



SINERGI PANGKALAN TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN UDARA DAN BANDARA HALIM PERDANAKUSUMA MENGANTISIPASI ANCAMAN MILITER

Roni Wijaya
Prodi Strategi Pertahanan Udara
Fakultas Strategi Pertahanan
Universitas Pertahanan RI
roniwijaya2001@gmail.com,

***Abstract-** The existence of the air base often intersects with the airport. This condition needs to be understood because it is known that the Indonesian Air Force base is not only used for defense but also for civil or commercial aviation, namely the Civil Inclave Airport as happened at Halim Perdanakusuma. The existence of the Halim Perdanakusuma Air Force Base and Halim Perdanakusuma Airport which are in one room is certainly not an easy matter, moreover it only has one runway that is used together where each has its own orientation, as it is known that the Air Base has a concern for building defense bases while The airport is oriented towards commercial flights. Conditions are getting more difficult with increasingly complex dynamics of threats so that constructive efforts are needed in the form of anticipating military threats and aviation safety. The research method used is a qualitative method with a phenomenological research design. The data obtained from the specified informants were then analyzed using qualitative techniques. From this study it was concluded that 1) the implementation of base defense at Halim Perdanakusuma AFB in anticipating military threats had not been carried out optimally, 2) the implementation of flight operations at Halim Perdanakusuma Airport in anticipating flight safety referring to existing provisions, and 3) synergy between Halim Perdanakusuma AFB and Halim Perdanakusuma Airport in anticipating military threats and aviation safety have not been implemented properly.*

Keywords: synergy, base defense, flight operations, military threats, aviation safety



1. Pendahuluan

Dalam perkembangannya keberadaan pangkalan udara kerap kali bersinggungan dengan bandara udara. Kondisi ini perlu dipahami karena sebagaimana diketahui bahwa pangkalan TNI Angkatan Udara yang ada di Indonesia tidak hanya difungsikan pada bidang pertahanan tetapi juga dimanfaatkan untuk penerbangan sipil atau komersil, yaitu Bandara Inclave Sipil. Salah satunya terjadi pada Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma. Keberadaan Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma pada dasarnya memiliki peran krusial dalam sistem pertahanan udara. Landasan Udara Halim Perdanakusuma bukan hanya merupakan Markas Komando Pertahanan Udara Nasional, akan tetapi juga pusat angkutan udara strategis nasional untuk keperluan perang dan operasi selain perang, khususnya operasi kemanusiaan dan penanggulangan bencana. Lanud Halim merupakan salah satu pusat komando krisis bila terjadi bencana nasional seperti pada Tsunami Aceh beberapa tahun lalu. Halim juga merupakan pusat pengendali atas masalah bila terjadi hijacking seperti pada saat peristiwa "Woyla". Untuk itu pengembangan rencana strategis hendaknya dapat menyesuaikan dengan kebutuhan Lanud ketersediaan alutsista seperti pesawat, radar serta sarana dan prasarananya. Disamping itu juga sebagaimana diketahui bahwa Lanud Halim Perdanakusuma juga diperuntukkan sebagai penerbangan komersil sehingga perlu dijamin atas keselamatan penerbangannya. Melihat kondisi yang demikian maka pengelolaan Lanud Halim Perdanakusuma perlu dikelola dengan baik dengan mengoptimalkan berbagai sumber daya yang ada sehingga mampu menghadapi ancaman-ancaman yang ada dan pada akhirnya mencapai tujuan yang diharapkan. Lebih lanjut keberadaan Lanud Halim Perdanakusuma sebagai pangkalan operasi, menjadi salah satu komponen penting, dan secara langsung berperan aktif dalam berbagai operasi baik dari aspek penyiapan personel maupun alusistanya, serta koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan operasi.



Untuk itu keberadaan Lanud Halim perlu dioptimalkan agar dapat mampu menghadapi berbagai ancaman yang ada. Sebagaimana diketahui ancaman saat ini sangat kompleks, karena tidak hanya terkait dengan militer namun juga nirmiliter. Atas dasar tersebut maka Lanud Halim Perdanakusuma perlu dikelola dengan sebaik-baiknya dengan terbangunnya sinergi antar kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan salah satu operasi pertahanan pangkalan yang dimiliki TNI AU dimana operasi tersebut merupakan bentuk operasi udara khusus yang melibatkan berbagai unsur untuk melindungi kekuatan udara (Keputusan Kasau No.373/XII/2019).

Dalam membangun pertahanan pangkalan yang dilaksanakan TNI AU pada dasarnya perlu dipahami secara komprehensif termasuk dengan menggunakan sistem pertahanan udara yang disusun secara berlapis dengan pola gelar alutsista sebagai berikut (Zalia, 2017):

- a. Pertahanan udara area, wilayahnya sejauh radius 100 km dari objek vital nasional sampai kepada batas kemampuan penyeragaman menggunakan pesawat sergap yang dikendalikan oleh ground-controlled interception (CGI). Pada lapisan pertahanan ini, pesawat tempur sergap digunakan sebagai kekuatan penghancur (*destruction force*);
- b. Pertahanan udara teminal, merupakan pertahanan wilayah radius 18 km sampai 100 km dari objek vital nasional. Rudal jarak sedang digunakan dalam lapis pertahanan ini. Jika rudal belum mampu melingkupi area pertahanan yang dimaksud, unsur penghancur kemudian tetap menggunakan pesawat tempur sergap.
- c. Pertahanan udara titik, mencakup wilayah dengan radius 18 km dari objek vital nasional. Area pertahanan ini menggunakan unsur pesawat sergap dengan kecepatan yang rendah (*low speed*) sekaligus menggunakan unsur artileri pertahanan udara yang terdiri atas rudal taktis/rudal jarak pendek atau meriam udara yang berfungsi sebagai unsur penghancur.

Lebih lanjut dalam pertahanan pangkalan pada konteks ini berkenaan dengan pertahanan udara titik dan pertahanan di darat, dimana keduanya sama-sama

memiliki peran strategis dalam terwujudnya pertahanan negara yang kuat. Namun demikian antara Pangkalan TNI AU dan Bandara Halim Perdanakusuma yang berada dalam satu ruang tentu bukan perkara mudah, apalagi hanya memiliki satu runway/landasan pacu yang digunakan bersama-sama di mana masing-masing mempunyai orientasinya sendiri, sebagaimana diketahui Lanud memiliki konsen terhadap membangun pertahanan pangkalan sedangkan Bandara berorientasi pada baiknya penerbangan komersil. Munculnya konflik atas penggunaan pasti pernah terjadi. Beberapa persoalan yang dihadapi disebabkan oleh:

- a. Pelaksanaan pertahanan pangkalan di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma dalam mengantisipasi ancaman militer belum terlaksana dengan optimal;
- b. Pelaksanaan operasional penerbangan di Bandara Halim Perdanakusuma dalam mengantisipasi keselamatan penerbangan belum optimal;
- c. Terbatasnya sarana dan dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan tugas; dan
- d. Belum terbangunnya sinergi dalam mengantisipasi ancaman militer dan keselamatan penerbangan antara pihak Lanud dan Bandara Halim Perdanakusuma.

Berdasarkan uraian di atas maka diperlukan telaah lebih lanjut khususnya terkait dengan membangun sistem pertahan udara yang baik dengan menerapkan strategi dan upaya yang tepat, terukur dan komprehensif. Berkenaan dengan hal tersebut maka penulis menuangkannya dalam judul “Analisis Sinergi Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma dan Bandara Halim Perdanakusuma Dalam Mengantisipasi Ancaman Militer dan Keselamatan Penerbangan”.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Teori Sinergi



Covey (1997) menjelaskan sinergi sebagai kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar daripada dikerjakan sendirisendiri, selain itu gabungan beberapa unsur akan menghasilkan suatu produk yang lebih unggul. Oleh sebab itu, sinergitas dalam pembangunan berarti keterpaduan berbagai unsur pembangunan yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar. lebih lanjut dalam memahami sinergitas akan mudah terjadi bila komponen-komponen yang ada mampu berpikir sinergi, terjadi kesamaan pandang dan saling menghargai. Sinergi merupakan hasil menciptakan suasana lingkungan dimana orang-orang yang berbeda dapat saling memberi sumbangannya berdasarkan kekuatan masing-masing sehingga hasilnya lebih besar dibandingkan dikerjakan sendiri-sendiri (Oxford Dictionary, 2008). Sinergitas merupakan pendekatan yang paling efektif untuk memecahkan persoalan daripada sikap yang apatis ataupun konfrontasi.

Adapun sinergi dalam konteks lain sebagaimana dijelaskan Mulyana (2007) adalah bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan secara maksimal. Setiap anggota di dalam organisasi mempunyai perasaan harmoni dengan anggota lainnya sehingga memungkinkan mereka menuntaskan pekerjaannya dengan baik dan penuh kegembiraan. Syarat utama penciptaan sinergi terlihat dari: kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreatifitas. Penjelasan di atas memberikan pemahaman bahwa sinergi dapat diartikan sebagai kegiatan gabungan atau kerjasama yang dilakukan guna mendapatkan hasil yang lebih maksimal dengan terhubung oleh beberapa peran yang berbeda namun terkait didalamnya. Oleh karena itu seluruh komponen yang ada perlu menjalin kesatuan sehingga tujuan yang ditetapkan dapat tercapai khususnya dalam Analisis Sistem Pertahanan Pangkalan TNI AU dan Bandara Halim Perdanakusuma dalam mengantisipasi ancaman militer dan keselamatan penerbangan.

2.2 *Air Power*

Air power atau kekuatan udara merupakan konsep yang selalu memiliki bias

dalam pendefinisian karena memiliki cangkupan yang luas. Semenjak adanya penerbangan pertama di dunia, konsep air power dikenalkan oleh Marsekal Royal Air Force Sir John Slessor (2009), dimana kekuatan udara merupakan gabungan dari segala komponen yang berkaitan dengan Angkatan Udara baik yang berkaitan secara langsung maupun tidak; seperti industri pesawat terbang, penerbangan sipil, layanan meteorologi, industri bahan bakar dan sebagainya. Seiring dengan perkembangan, konsep air power mengalami penyempurnaan dan lebih fokus. Definisi air power dewasa ini direfleksikan sebagai:

“the ability to project military force in air or space by or from a platform or missile operating above the surface of the earth. Air platforms are defined as any aircraft, helicopter or unmanned air vehicle” (Frank, 2009).

Secara umum dapat dinyatakan bahwa istilah air power merupakan keahlian atau kemampuan suatu negara dalam memperkirakan kekuatan militer yang ada di udara atau ruang angkasa. Dalam membangun sistem pertahanan negara khususnya ranah udara, hal ini tentu sangat dibutuhkan dalam menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional negara tersebut. Indonesia berupaya menjalankan operasi TNI AU berdasarkan pemahaman air power yang selanjutnya diturunkan dalam aturan dan kebijakan sebagai berikut:

- a. Doktrin TNI AU Swa Bhuwana Paksa 2019, yaitu tujuan, penyerangan, pendadakan, pengamanan, pemusatan serangan, ekonomis, kesatuan komando, kesederhanaan, kekenyalan, kohesi, kesatuan usaha, pemanfaatan informasi, manfaat dan keunggulan moral.
- b. USAF Basic Doctrine 2003, yaitu sentralisasi komando dan desentralisasi pelaksanaan, fleksibel dan serba guna, dampak yang saling berhubungan, kehadiran terus menerus, konsentrasi, prioritas dan keseimbangan.
- c. RAAF Air Power Manual 3000, yaitu pegang teguh tujuan, memelihara moral, keamanan, daya kejut, daya serang, pemusatan kekuatan, ekonomis, fleksibilitas, kerjasama dan daya tahan.

Dalam konteks penelitian ini, konsep air power menjelaskan aspek pertahanan yang berdimensi ruang udara dengan melihat potensi yang dapat dikembangkan dalam sistem pertahanan Udara. Hal ini sebagai bagian dalam menjaga kedaulatan wilayah NKRI dari berbagai ancaman yang ada.

2.3 Pertahanan Udara

Terdapat tiga pilar utama dalam upaya penyelenggaraan kebijakan pertahanan dan keamanan nasional di Indonesia. Tiga pilar tersebut dimaksudkan untuk dapat menghadapi ancaman yang tidak dapat dipastikan dengan tepat. Tiga pilar tersebut antara lain; penggunaan, pembangunan dan kerjasama internasional pertahanan dan keamanan (Kementerian Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia, 2006). Terkait dengan konsep pertahanan dengan kesemestaan harus dipahami secara komprehensif, karena menyangkut berbagai aspek kehidupan termasuk dalam bidang politik, sosial, ekonomi, agama termasuk juga pada sistem pertahanan dan keamanan. Hal ini juga menuntut pembacaan yang baik atas perkembangan lingkungan strategis (lingstra) yang sangat dinamis khususnya berkaitan dengan dinamika ancaman yang dapat mengganggu stabilitas nasional dalam lingkup darat, laut dan udara.

Luasnya cakupan sistem pertahanan negara, maka dalam konteks ini akan difokuskan pada pertahanan dalam lingkup udara. Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara No. 14 tahun 2003 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan upaya menciptakan pertahanan udara digunakan segenap tindakan untuk dapat membatalkan, menghalau, menghancurkan, dan mengurangi serta menanggulangi ancaman serangan udara. Definisi tersebut memberikan pemahaman bahwa salah satu tujuan dari pertahanan udara yaitu melindungi wilayah negara dari berbagai ancaman. Selanjutnya, salah satu langkah yang dapat dilaksanakan yaitu dengan upaya penggunaan kekuatan militer (alutsista) yang dimiliki

2.4 Komando dan Kendali

Komando dan Kendali (K2) merupakan proses dan sarana untuk



melaksanakan wewenang dan pengarahan yang sah (menurut hukum) atas kekuatan yang ditugaskan (Australian Air Publication, 2013). K2 menyatukan orang, sistem, dan proses yang digunakan untuk membuat kebijakan, mengembangkan kemampuan, membuat keputusan-keputusan operasional, dan menyiapkan kekuatan untuk operasi untuk mencapai tujuan-tujuan nasional. K2 menggunakan suatu sistem yang kompleks yang melibatkan personel, wahana, teknologi manajemen informasi, aringan komunikasi, dan alat-alat dukungan keputusan dan kesadaran lingkungan operasi. Karena sifat dinamis operasi-operasi udara di daerahdaerah luas, sistem K2 perlu fleksibel dan responsif pada operasi-operasi udara yang dikendalikan dan dikelola secara efektif di dalam dan di luar mandala-mandala operasi. Dalam konteks kekuatan udara, peran K2 mempunyai ciri-ciri yang unik yang mencerminkan sifat dari ranah udara dan cara para prajurit udara profesional beroperasi dan bertempur di dalamnya. K2 Angkatan Udara terdiri dari mekanisme untuk mengelola kegiatan-kegiatan memelihara, melatih, dan menopang kekuatan udara melalui organisasi dan rantai komando Angkatan Udara, dan menggunakan kekuatan udara melalui Sistem Pengendalian Udara.

2.5 Pertahanan Pangkalan

Adapun Pertahanan Pangkalan diartikan sebagai kegiatan yang bertujuan untuk mengatasi ancaman dan atau serangan musuh yang datang baik secara vertikal maupun horizontal sehingga pangkalan tetap dapat dioperasikan sesuai dengan fungsinya (Juknis TNI AU, 2004). Penyelenggaraan pertahanan tidak dapat dilepaskan dari dinamika ancaman yang terjadi dengan memperhatikan asas, hakikat, sifat dan dasar-dasar pertahanan. Hal ini menjadi penting, karena keberhasilan operasi udara akan menjadi terganggu atau lumpuh apabila Pangkalan tersebut dikuasai atau dihancurkan lawan. Oleh sebab itu, Operasi Pertahanan Pangkalan TNI Angkatan Udara membutuhkan perangkat yang handal dan personel yang profesional. Dalam konteks pertahanan pangkalan, Pasukan Khas TNI Angkatan Udara (Paskhas) merupakan satuan yang professional merupakan



kekuatan inti dalam Operasi Pertahanan Pangkalan, didukung oleh pasukan organik pangkalan. Agar penyelenggaraannya dapat berjalan dengan efektif maka diperlukan buku petunjuk teknis sebagai pedoman yang mengatur tentang Operasi Pertahanan Pangkalan.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini tergolong sebagai penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Hal ini sangat dibutuhkan khususnya dalam memahami Analisis Sinergi Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma dan Bandara Halim Perdanakusuma Dalam Mengantisipasi Ancaman Militer dan Keselamatan Penerbangan. Adapun penelitian ini dilakukan di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma dan Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Terkait dengan subjek pada penelitian ini pada dasarnya berasal dari informan atau nara sumber yang mempunyai kapabilitas terkait dengan permasalahan penelitian yang diajukan. Beberapa pihak yang diwawancarai yaitu: Kepala Bandara (Executive General Manager), General Manager AirNav cabang Halim Perdanakusuma, Kepala Dinas Operasi, Deputy Chief Aviation Security dan Komandan Satuan Pertahanan Pangkalan. Adapun obyek penelitian dalam hal ini yakni terkait dengan Analisis Sinergi Pangkalan TNI AU dan Bandara Halim Perdanakusuma dalam Pertahanan Pangkalan/Bandara Guna Mengantisipasi Ancaman Militer dan Keselamatan Penerbangan. Hal ini perlu dipahami karena sesuai dengan sifat dari penelitian kualitatif, maka sumber data pada penelitian ini akan dikembangkan terus hingga jenuh (snowball) dengan tujuan tertentu (purposive) sehingga data yang dikumpulkan dapat dikatakan memuaskan (Usman dan Purnomo, 2008). Dengan demikian maka penelitian ini tidak terbatas dari sumber data yang telah ditentukan namun terus berkembang sebagaimana data

diperlukan untuk memberikan hasil yang komprehensif dan komparatif. Adapun menjadi obyek riset yaitu Sinergi Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma dan Bandara Halim Perdanakusuma Dalam Mengantisipasi Ancaman Militer dan Keselamatan Penerbangan.

Berkenaan dengan teknik pengumpulan data kualitatif bersifat deskriptif maksudnya data berupa gejala-gejala yang dikategorikan ataupun dalam bentuk lainnya seperti foto, dokumen, artefak, dan catatan-catatan lapangan saat penelitian dilaksanakan (Sarwano, 2006). Teknik observasi, wawancara informan, dan studi literatur merupakan cara pengumpulan data, yang dijelaskan sebagai berikut:"

- a. Observasi, pengumpulan data dengan metode observasi merujuk pada keseluruhan proses yang memiliki kompleksitas, kesatuan proses yang merupakan manifestasi dari berbagai proses biologis maupun proses psikologis. Dalam observasi ini dilakukan pengamatan secara langsung di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Bandara Halim Perdanakusuma dan wilayah di sekitarnya yang menjadi tanggung jawab pertahanan pangkalan. Selain itu peneliti juga mengamati interaksi dalam proses operasional sehari-hari baik di Pangkalan TNI dan di Bandara Halim Perdanakusuma, mengamati perilaku personel termasuk pejabat atau masyarakat di lingkungan tersebut.
- b. Wawancara, merupakan sebuah metode pengumpulan informasi dan data dengan memberikan pertanyaan riset kepada informan untuk dijawab. Metode ini dilaksanakan dengan dialog ilmiah dua arah. Sejalan dengan pendapat Patton, proses wawancara harus disertai dengan pertanyaan wawancara yang berfungsi sebagai pedoman. Dalam penelitian ini, wawancara informan dilengkapi dengan pedoman wawancara yang sangat umum, dengan mencantumkan topik yang akan dielaborasi oleh penulis tanpa urutan pertanyaan yang kaku.
- c. Studi Dokumentasi, guna mendukung keabsahan penelitian ini, tentu

diperlukan literatur dan dokumen pendukung argumentasi yang terbangun pada data primer. Pada penelitian literatur yang dipakai sebagai acuan dan referensi dalam penulisan berupa buku-buku petunjuk, Protap, artikel, tajuk, maupun editorial yang terdapat pada media cetak dan digital serta kajian yang berkaitan dengan integrasi pertahanan. Dokumen resmi internal yang menjadi referensi dalam penelitian ini adalah salinan Keputusan Kepala Staf TNI Angkatan Udara, postur TNI Angkatan Udara, Blue Print TNI Angkatan Udara, Undang-undang, Buku Putih Pertahanan Negara, buku sejarah perjalanan TNI AU, serta beberapa dokumen pendukung yang relevan. Dokumen eksternal memuat data-data dan informasi yang dihasilkan oleh lembaga sosial seperti majalah, buletin, pernyataan, dan berita yang dipublikasikan dalam media massa. Dokumen dan transkrip tersebut penulis gunakan untuk ini menelaah konteks sosial dan hal-hal lain yang relevan dengan penelitian.

Terkait dengan analisa data pada penelitian ini dilaksanakan dengan berkelanjutan serta interaktif hingga tuntas, atau dikenal dengan istilah kejenuhan data (Miles and Huberman, 2014). Dimaksud data yang jenuh adalah tidak diperolehnya lagi data dan informasi lebih jauh dalam menjawab tema atau permasalahan tertentu. Aktivitas dalam analisis meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*).

4. Hasil dan Diskusi

Sebagaimana diketahui Bandar Udara Internasional Halim Perdanakusuma merupakan bandar udara yang berlokasi di Jakarta, Indonesia. Bandar udara ini juga digunakan sebagai markas Komando Operasi Angkatan Udara I (Koops AU I) TNI-AU. Adapun Bandara Udara Halim Perdanakusuma hanya memiliki satu run way dimana itu pun dipergunakan oleh Lanud Halim Perdanakusuma. Adapun Lanud

pada dasarnya memiliki peran strategis dalam sistem pertahanan udara nasional, Lanud Halim Perdanakusuma dituntut dalam keadaan baik sehingga mampu menghadapi berbagai ancaman. Adapun dalam konteks tersebut, mengacu pada Perkasau No. 58 tahun 2020 pasal 1 ayat 1 maka Satuan Pertahanan Pangkalan (Sathanlan) memiliki peran krusial dalam sebagai satuan pembantu operasi Danlanud yang bertugas melaksanakan operasi pertahanan pangkalan udara, pertahanan objek strategis TNI AU, dan operasi militer lainnya sesuai dengan kebijakan komando atas.

Terkait dengan tersebut, maka pengumpulan data dalam tulisan ini meliputi pada tiga hal yaitu: pelaksanaan pertahanan pangkalan yang dilaksanakan oleh Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma dalam mengatasi ancaman militer, pelaksanaan operasional penerbangan di Bandara Halim Perdanakusuma dalam mengantisipasi keselamatan penerbangan dan sinergi pertahanan pangkalan antara pihak TNI AU dan Bandara Halim Perdanakusuma. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1 Pelaksanaan pertahanan pangkalan yang dilaksanakan oleh Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma dalam mengatasi ancaman militer

Pertahanan udara oleh pangkalan TNI AU sesuai Sishanudnas dilaksanakan oleh Kohanudnas, dalam hal ini menjadi wilayah operasi Kosek Hanudnas I, Jakarta. Pelibatan alutsista dari alutsista TNI AU yang di BKO ke Kohanudnas untuk siaga seluruh wilayah pertahanan Udara nasional. Sistem pertahanan Udara dilaksanakan dengan berpedoman pada pertahanan mendalam atau defence in depth, yaitu pertahanan Udara area oleh pesawat Tempur, radar, dan unsur Hanud lain, pertahanan Udara terminal oleh unsur pesawat, radar, dan pertahanan Udara titik. Kemudian Pangkalan TNI AU Halim dalam melaksanakan pertahanan Udara titik seluruhnya mengikuti sesuai gelar oleh Kosek Hanudnas I baik dalam operasi dan



latihan. Dalam pelaksanaan siaga Hanud belum ada alutsista yang siap tergelar. Untuk itu Lanud Halim harus memiliki alutsista dalam pertahanan Udara titik dan bersinergi dengan Bandara. Perihal pertahanan udara salah satu yang menjadi penting untuk diketahui yaitu pertahanan Udara Titik, dimana yang wilayah sampai dengan radius 18 km dari objek vital nasional. Dipertahankan dengan menggunakan unsur pesawat penyergap low speed dan unsur artileri pertahanan udara yang terdiri dari rudal taktis/rudal jarak pendek atau meriam pertahanan udara sebagai alat penghancur. Pertahanan udara ini menjadi penting khususnya dalam melindungi objek vital seperti Lanud Halim Perdanakusuma atas ancaman yang perlu diantisipasi.

Lebih lanjut dalam perjalanannya Pertahanan Udara oleh Bandara sepenuhnya dilaksanakan mengikuti Pangkalan TNI AU Halim bahkan cenderung mengandalkan Lanud. Untuk itu pihak Bandara seharusnya mampu bersinergi dengan Lanud untuk bersama-sama meningkatkan pelaksanaan Hanud. "Adapun dalam menjamin pangkalan dapat beroperasi sesuai dengan fungsinya, diperlukan pola-pola dan teknik-teknik pertahanan yang benar. Pola dan teknik yang dikembangkan harus dapat dihadapkan kepada dinamika ancamandan memperhatikan perkembangan faktor-faktor yang mempengaruhi. Sebagaimana dijelaskan bahwa ancaman saat ini dinamis karena tidak hanya dalam bentuk konvensional (fisik) dan saat ini berkembang menjadi multidimensional (fisik dan nonfisik), baik yang berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri." Untuk itu dibutuhkan adanya konsep dasar yang meliputi asas-asas, prinsip, hakikat, sifat, dan dasar-dasar Pertahanan Pangkalan agar mampu memperkuat pertahanan udara dalam menghadapi berbagai ancaman baik yang bersifat vertikal maupun horizontal (Snyder, 1999).

Berbagai ancaman diatas perlu dipahami secara baik karena sangat berpotensi mengganggu stabilitas nasional. Untuk itu maka upaya-upaya strategis dalam membangun pertahanan pangkalan agar dapat berfungsi secara optimal. Selain itu tujuan lain dari diperlukannya pertahanan pangkalan yaitu melindungi pangkalan



dari berbagai bentuk ancaman baik secara vertikal maupun horizontal, menjamin kelancaran operasi-operasi udara sehingga dapat berlangsung dengan tertib dan aman, menjamin keamanan personel dari pengepungan dan atau penghancuran musuh dan mencegah musuh menggunakan Pangkalan TNI Angkatan Udara. Hal ini menunjukkan bahwa Pertahanan Vertikal atau pertahanan Udara di Pangkalan TNI AU dan Bandara melaksanakan Hanud dengan dilaksanakan oleh Kohanudnas dalam hal ini Kosek Hanudnas I. Lebih lanjut maka dibutuhkan sinergi baik tidak hanya dari pihak Pangkalan TNI AU tetapi juga Bandara Halim Perdanakusuma dengan mengoptimalkan penggunaan sumberdaya yang ada sehingga mampu membangun pertahanan pangkalan yang diharapkan. Dalam konteks ini maka sebetulnya perlu ada adanya komite khusus yang mengatur pelaksanaan operasi pertahanan pangkalan agar menghindari persoalan-persoalan yang mungkin akan muncul dikemudian hari. Komite ini memiliki peran krusial dalam koordinasi antara pihak Lanud dan Bandara sehingga operasi pertahanan pangkalan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya hingga akhirnya mampu mewujudkan stabilitas.

Dalam konteks tersebut maka perlu tata kelola yang terukur dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen, diantaranya merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Hal ini perlu dipahami karena Lanud Halim Perdanakusuma sebagai sebuah satu kesatuan memiliki berbagai sumber daya yang perlu dioptimalkan dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen sehingga dapat mendukung tercapainya tujuan. Dalam konteks ini mengacu pada Buku Petunjuk Teknis TNI AU tahun 2004 tentang Operasi Pertahanan Pangkalan bahwa manajemen yang dimaksud terdiri atas perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengakhiran dimana hal ini merupakan satu kesatuan yang perlu dikelola dengan sebaik-baiknya (MABES TNI AU, 2004).



a. Perencanaan. Pada dasarnya perencanaan dilaksanakan sejak menerima perintah dari komando atas sampai dengan tahap persiapan. Dalam menyusun perencanaan harus memperhatikan pada kondisi medan, personel, dan persenjataan dihadapkan kepada bentuk dan eskalasi ancaman serta harus mengutamakan faktor-faktor kekenyalan dan kecepatan. Hal-hal substansi dalam tahap perencanaan adalah sebagai berikut:

- 1) Perencanaan Intelijen. Dalam menyusun perencanaan Operasi Pertahanan Pangkalan diperlukan data intelijen yang akurat dan mutakhir mencakup tentang kondisi cuaca, medan, dan musuh.
- 2) Perencanaan Pelibatan. Dalam perencanaan pelibatan harus mempertimbangkan aspek personel, persenjataan, kendaraan, alat peralatan, dislokasi dan pengeselonan pada serangan balas. Susunan tugas dan jangka waktu penugasan disesuaikan dengan eskalasi ancaman.
- 3) Perencanaan Pertahanan, merupakan perencanaan pertahanan memuat hal-hal seperti: penentuan titik gelar, taktis darat, penyamaran, pembagian sektor, penentuan koridor, dan tembakan.
- 4) Perencanaan Pemutusan Pertempuran, merupakan rencana pemutusan pertempuran dimaksudkan untuk menghadapi kondisi keamanan yang sama sekali tidak menguntungkan untuk bertahan. Dalam membuat perencanaan pemutusan pertempuran memuat hal-hal sebagai berikut: penentuan jalan pendekat, pengunduran, serangan balas dan daerah penghancuran musuh.
- 5) Perencanaan Evakuasi, dalam konteks ini perencanaan evakuasi memuat hal-hal seperti: penyiapan satuan

- paramedis dan penyiapan sarana mobilisasi dan rumah sakit rujukan.
- 6) Perencanaan Komunikasi, yaitu terkait dengan: penggelaran jaring kodal, adminlog, dan koordinasi, penggunaan sandi, kebutuhan alkomlek dan lawan pernika.
 - 7) Perencanaan Logistik yang memuat hal-hal sebagai berikut: kebutuhan bekal kelas I sampai dengan kelas V dan kebutuhan bekal awal dan bekal ulang.
- b. Persiapan, pada bagian ini persiapan dilaksanakan sejak berakhirnya tahap perencanaan sampai dengan tahap pelaksanaan. Adapun persiapan kegiatan yang dilaksanakan diantaranya: melaksanakan pengecekan kesiapan personel, persenjataan, amonisi, kendaraan dan perlengkapan lain (kaporlap, kapsatlap, aldurlap, alkomlek dan alpalsus) sesuai dengan rencana, menyiapkan dan mengoordinasikan kekuatan bantuan, melaksanakan pengecekan kesiapan personel, persenjataan, amunisi, kendaraan dan perlengkapan lain, melaksanakan pertahanan vertikal ataupun horizontal dan lain sebagainya.
- c. Pelaksanaan, pada fase ini dimulai sejak pasukan masuk kedudukan sesuai dengan fungsi masing-masing sampai dengan dinyatakan selesai. Pelaksanaan pertahanan pangkalan dilakukan pada situasi aman, rawan dan gawat
- d. Pengakhiran. Pengakhiran suatu Operasi Pertahanan Pangkalan dinyatakan oleh Komando Satuan Atas. Pada tahap pengakhiran, kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:
- 1) Musuh berhasil menerobos pertahanan:



- a) Komandan Unsur Paskhas melapor kepada Komandan Satuan Pertahanan Pangkalan.
 - b) Komandan Satuan Pertahanan Pangkalan memberi instruksi pengunduran kepada unsur pertahanan ke daerah aman dalam rangka penyusunan kekuatan.
 - c) Mengarahkan musuh ke daerah penghancuran.
 - d) Melaksanakan penyelamatan dan/atau pemusnahan dokumen, materiil penting, sarana prasarana satuan sendiri agar tidak dapat digunakan musuh.
 - e) Melaksanakan serangan balas.
- 2) Musuh berhasil dihancurkan, yaitu komandan unsur Paskhas melapor kepada Komandan Satuan Pertahanan Pangkalan; menyerahkan tawanan kepada yang berwenang; dan melaksanakan konsolidasi dan melaporkan hasilnya kepada satuan atas.

Berkenaan dengan hal tersebut Lanud Halim yang dikategorikan Lanud Tipe A dimana Sathanlan DSP diawaki 118 personel namun saat ini diawaki 33 personel dan alutsista serta kemampuan yang sangat minim. Kondisi ini tentu sangat kurang dalam membangun pertahanan pangkalan yang diharapkan tak terkecuali dalam penggunaan alutsista. Ketersediaan alutsista yang memadai menjadi mutlak dibutuhkan karena sesuai dengan sifat dari pertahanan pangkalan yaitu 1) tetap, artinya pertahanan yang stasioner dengan pertimbangan taktis dan arah datangnya ancaman; 2) mobile pertahanan yang dinamis dengan pertimbangan taktis dan arah datangnya ancaman; dan 3) gabungan pertahanan kombinasi antara pertahanan tetap dan pertahanan mobil dengan mempertimbangkan kemungkinan arah datangnya ancaman serta pertimbangan taktis dan medan. Karena sebagaimana dipahami bahwa pertahanan pangkalan yang diperuntukkan di Halim Perdanakusuma tidak hanya dimanfaatkan untuk kepentingan militer (Lanud) tetapi juga difungsikan dalam penerbangan komersil. Karenannya penting untuk

mempersiapkan segala sesuatunya khususnya dalam menjamin kesiapan alutsista yang dibutuhkan. Untuk itu memerlukan kejelian dan kepekaan dalam melihat kondisi serta sumber daya yang ada agar langkah- langkah yang diambil lebih terukur dan berdampak positif bagi terwujudnya pertahanan pangkalan yang kuat. Adapun dalam penyelenggaraan penggunaan personel di dalam pertahanan pangkalan diatur sebagai berikut:

- a. Pengaturan Personel. Pengaturan personel dilaksanakan oleh satuan masing-masing yang terlibat dalam pertahanan pangkalan. Adapun ketentuannya sebagai berikut :
 - 1) Unsur Paskhas. Unsur Paskhas disiapkan oleh Dankorpaskhas untuk Bawah Komando Operasi (BKO) kepada Pangkoopsau dalam rangka pertahanan pangkalan udara.
 - 2) Unsur Organik Pangkalan. Unsur organik pangkalan melekat pada sista yang diawaki dan penugasan ditentukan oleh Satuan Komando Atas masing- masing.
- b. Perawatan Personel. Perawatan personel unsur Paskhas dan unsur organik pangkalan berada pada Komandan Satuan Pertahanan Pangkalan.
- c. Pembinaan Hukum, Disiplin dan Tata Tertib. Pembinaan hukum, disiplin, dan tata tertib unsur-unsur yang melaksanakan Operasi Pertahanan Pangkalan

Berdasarkan uraian diatas maka perlu dilakukan langkah-langkah strategis khususnya dalam mendukung pelaksanaan pertahanan pangkalan yang dilaksanakan oleh Pangkalan TNI AU dan Bandara Halim Perdanakusuma dengan memberntuk Tim patroli bersama dalam pengamanan perimeter Dan pam hingga ring 3 serta meningkatkan kerjasama pihak Lanud dan Bandara serta unsur- unsur terkait lainnya.

4.2 Pelaksanaan operasional penerbangan di Bandara Halim Perdanakusuma dalam mengantisipasi keselamatan penerbangan

Pada dasarnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang penerbangan diikuti dengan terciptanya regulasi dan badan/institusi yang mengatur dunia penerbangan. Dengan mematuhi peraturan dan prosedur penerbangan yang ada, maka dapat meningkatkan keselamatan penerbangan sehingga menciptakan layanan penerbangan yang lebih aman dan nyaman. Transportasi udara telah menjadi suatu industri global yang melibatkan hampir seluruh negara di dunia. Pengaturan mengenai industri ini di atur dalam hukum udara yang menjadi hukum kebiasaan internasional sehingga terdapat keseragaman pengaturan secara internasional. ICAO sebagai organisasi transportasi udara internasional tidak pernah menargetkan zero accident. Hal ini dikarenakan zero accident merupakan target yang tidak akan pernah dicapai (*unachievable goal*). ICAO memiliki target tersendiri yang tertuang dalam *Global Aviation Safety Plan (GASP)*. *Global Aviation Safety Plan (GASP)* ini menyajikan strategi yang mendukung prioritas dan peningkatan berkelanjutan dari keselamatan penerbangan. Adapun target yang berusaha di capai oleh ICAO yang tertuang dalam *Global Aviation Safety Plan (GASP)* ialah meminimalisir kasus kecelakaan fatal dalam dunia penerbangan, berupaya mengurangi angka kecelakaan (*accident rates*) secara signifikan terutama di kawasan yang memiliki angka kecelakan yang tinggi, berupaya agar tidak ada kawasan yang memiliki angka kecelakaan dua kali angka kecelakaan seluruh dunia. Setiap negara harus memaksimalkan upaya-upaya yang dilakukan agar mencapai satu tujuan yang sama yaitu *an acceptable level of safety*. Untuk mencapai satu tujuan yang sama maka kebijakan-kebijakan penerbangan yang di buat oleh suatu negara yang berkaitan dengan keselamatan (*safety*) dan keamanan (*security*) harus berdasar pada paradigma-paradigma yang digunakan oleh ICAO yang tertuang dalam 19 Annex dan berbagai dokumen turunan lainnya.

Pentingnya keselamatan dan keamanan penerbangan selanjutnya menjadi hal yang juga perlu diperhatikan oleh maskapai penerbangan Indonesia. Di Indonesia,

hal ini di atur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan pasal 228 bahwa setiap penyedia jasa penerbangan wajib membuat, melaksanakan, mengevaluasi dan menyempurnakan secara berkelanjutan sistem manajemen keselamatan dengan berpedoman kepada program keselamatan penerbangan nasional. Sistem manajemen keselamatan tersebut setidaknya harus memuat kebijakan dan sasaran keselamatan, manajemen risiko keselamatan, dan jaminan keselamatan dan promosi keselamatan.

4.3 Sinergi pertahanan pangkalan antara pihak TNI AU dan Bandara Halim Perdanakusuma

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa koordinasi yang terbangun didasarkan pada Siskodal dalam Operasi Pertahanan Pangkalan merupakan subsistem dari Sistem Komando dan Pengendalian Satuan Atas yang terkait. Wewenang Pengendalian Operasi Pertahanan Pangkalan berada di tangan Komandan Pangkalan selaku Komandan Satuan Pertahanan Pangkalan. Untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, maka diperlukan sistem komando dan pengendalian yang handal. Dalam kasus Pangkalan TNI AU dan Bandara Halim Perdanakusuma, Siskodal menjadi elemen yang perlu untuk dijalankan dengan sebaik-baiknya karena berhubungan atas keberhasilan pelaksanaan tugas khususnya dalam pertahanan pangkalan baik yang bersifat vertikal maupun horizontal. Komunikasi yang baik antara pihak pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma dan Bandara menjadi hal yang perlu dibangun agar mampu mewujudkan pertahanan pangkalan yang kuat.

Kemudian berkenaan uraian sebelumnya dimana kemampuan koordinasi tower telah dilengkapi dengan radar monitoring namun sejatinya belum dapat sepenuhnya dapat menjamin operasional penerbangan dalam mengantisipasi ancaman militer dan keselamatan penerbangan karena keterbatasan kemampuan radar pada tower. Maka perlu upaya strategis dengan meningkatkan kemampuan

radar yang dimiliki agar mampu mendukung dalam pelaksanaan tugas. Hal ini menjadi penting dilakukan mengingat radar dan tower dalam Lanud maupun Bandara memiliki peran strategis karena memiliki banyak fungsi tidak hanya mengetahui lawan tetapi juga mampu menopang dalam baiknya penerbangan di wilayah tersebut. Selain itu perlu juga didukung dengan peranti lunak sehingga dapat dihasilkan produk SOP yang mampu mendukung dalam pelaksanaan tugas baik pihak Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma maupun Bandara Halim Perdanakusuma.

5. Kesimpulan

Berdasarkan penjabaran perihal Analisis Sinergi Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma dan Bandara Halim Perdanakusuma Dalam Mengantisipasi Ancaman Militer dan Keselamatan Penerbangan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pertahanan pangkalan yang dilaksanakan oleh Pangkalan TNI AU belum sepenuhnya optimal. Hal ini perlu terlihat pada implementasi di lapangan masih terdapat kekurangsesuaian baik prosedur dan kondisi nyata. Namun demikian dalam pelaksanaan pertahanan pangkalan perlu segera ditingkatkan, terlebih lagi dinamika ancaman yang semakin kompleks. Hal ini perlu dipahami karena pertahanan pangkalan yang diperuntukkan di Halim Perdanakusuma tidak hanya berkaitan dengan Pangkalan TNI AU sebagai unsur militer tetapi juga Bandara yang fokus pada penerbangan komersil. Kondisi ini tentu perlu mendapatkan perhatian serius agar pertahanan pangkalan yang mampu dan kuat mengantisipasi ancaman militer dan keselamatan penerbangan dapat terwujud.
- b. Pelaksanaan operasional penerbangan di Bandara Halim Perdanakusuma dalam mengantisipasi keselamatan penerbangan pada dasarnya pada UU

Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan dimana penyelenggaraan penerbangan harus ditata dalam satu kesatuan sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan penyediaan jasa transportasi yang seimbang dengan tingkat kebutuhan, selamat, aman, efektif, dan efisien.

- c. Sinergi yang dibangun belum optimal dalam masih menghadapi berbagai persoalan diantaranya belum adanya peranti lunak yang mampu menopang pelaksanaan tugas, kemampuan tower dan radar yang terbatas di mana penerapan cenderung pada menitikberatkan pada peran TNI AU (Pangkalan Udara) sedangkan pihak Bandara Halim Perdanakusuma hanya sebatas mengikuti apa yang sudah digariskan pihak Pangkalan Udara. Hal ini menandakan belum terbangunnya koordinasi yang sinergi karena keterlibatan dalam membangun pertahanan pangkalan cenderung oleh Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma atau Dinas TNI Angkatan Udara.

Berkenaan dengan uraian diatas maka perlu beberapa saran yang diberikan yaitu: perlu mekanisme terukur dengan melibatkan pihak-pihak terkait khususnya dalam membangun pertahanan pangkalan. Hal ini dapat dilakukan melalui tata kelola dalam bentuk manajemen strategis sehingga dapat mewujudkan pertahanan pangkalan yang kuat, TNI Angkatan Udara bersama pihak terkait perlu meningkatkan kemampuan alutsista. Hal ini dilakukan dengan melakukan evaluasi terlebih dahulu agar dapat diketahui alutsista apa saja yang dibutuhkan dan tidak dibutuhkan khususnya dalam menghadapi ancaman vertikal dan horizontal. Adapun secara khusus dalam hal ini Lanud Halim harus memiliki alutsista dalam pertahanan Udara Titik dan bersinergi dengan Bandara, perlu meningkatkan kuantitas dan kualitas personel yang ditugaskan dalam membangun pertahanan pangkalan. Hal ini penting dilakukan agar mampu memperkuat pertahanan pangkalan dari berbagai ancaman yang ada, perlu adanya bentuk komite yang



memiliki tanggung jawab terhadap pertahanan pangkalan di Pangkalan TNI AU dan Bandara Halim Perdanakusuma. Komite ini dapat memperkuat Siskodal yang nantinya diterapkan, perlu dilakukan rencana strategis atau blue print yang difokuskan pada membangun pertahanan pangkalan. Hal ini menjadi perlu dilakukan agar terdapat kejelasan ke depannya, mendukung pelaksanaan tugas dengan membangun SOP bersama yang dapat dijadikan pedoman bagi pihak Lanud dan Bandara Halim Perdanakusuma dan membentuk tim patroli bersama dalam pengamanan perimeter dan pengamanan hingga Ring 3 agar mampu mendukung pelaksanaan tugas.



Daftar Pustaka

- Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor 373/XII/2019 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Operasi Udara Khusus Dalam OMP
- MABES TNI AU. Buku Petunjuk Teknis TNI AU tahun 2004 tentang Operasi Pertahanan Pangkalan.
- Miles, Matthew B. and A. Michael Huberman. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Singapore: SAGE Publications Inc.
- Pemerintah RI, Undang-undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan.
- Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor 58 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tugas Satuan Pertahanan Pangkalan di Jajaran TNI Angkatan Udara.
- Sarwano, Jonathan. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Snyder, Craig A. (1999). *Contemporary Security and Strategy*. New York : Routledge.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. (2008). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Yusnaldi, Albert Mamahit , D., Supartono, & Mhd Halkis. (2022). *Civil-military coordination of national resources management in local communities, Indonesia case study*. Journal of Scientific Papers Social Development and Security, 12(1),
- Zalia, Handaina. (2017). *Air Defence Operation Defence in Depth Strategy to Protect The Aerospace Sovereignty of Crossright Violations by Foreign Military Aircraft in 2012-2017*, JOM FISIP Volume 5 edisi I.